

Oknum BTPN Palsukan Tandatangan

Da Rekening, ana Tak Diakui

MARANG— Kasus hilangnya dana deposito Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar diketahui banyak kejadian. Pihak Pemkot tidak habis pikir, bagaimana bisa, rekening koran dan bunga deposito dikirim setiap bulan, namun dana yang tertera dalam rekening tidak diakui pihak BTPN.

Pemkot Semarang melalui Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Yudi Mardiana sebenarnya sudah melaporkan kasus kehilangan dana Rp 22 miliar ini ke Polresta Semarang sejak pertengahan Januari lalu.

Saat ditemui *Jateng Pos* Yudi Mardiana mengatakan, pelaporan ini dimulai dari adanya kewajiban melakukan

■ Baca OKNUM BTPN...hal 7

**SKANDAL
DEPOSITO
PEMKOT**



DEPOSITO PEMKOT RP 22 M DI BTPN MENGUAP

- DPKAD curiga BTPN tidak menghadiri penandatanganan perpanjangan MoU
- Pemkot masih menerima rekening koran dan pembayaran bunga dari BTPN
- Dana dalam rekening dan sertifikat deposito tidak diakui BTPN
- Atas kejadian itu DPKAD melapor ke Polresta Semarang
- DPKAD menyertakan barang bukti rekening koran dan sertifikat
- Diduga ada pemalsuan tanda tangan dilakukan oknum BTPN
- BTPN menyusul melapor kehilangan dana ke Polda Jateng

OKNUM

penandatanganan perpanjangan naskah kerjasama antara pemegang kas dengan pimpinan perbankan. Namun dari tujuh pihak bank yang sudah kerjasama untuk menyimpan rekening kas daerah (Kasda) dalam bentuk giro, hanya Bank BTPN yang tidak hadir.

"Pelaksanaan MoU dilaksanakan 6 Januari 2015. Dari situ saya agak curiga, kenapa bank ini tidak hadir dalam penandatanganan ini. Padahal setiap tahun, kami harus memperbaharui perjanjian deposito berjangka tersebut," terangnya di Balaikota, Rabu (18/3).

Meski demikian, hingga Januari 2015, pihaknya masih menerima rekening koran dan pembayaran bunga dari bank tersebut. Bunga itu dibayarkan langsung ke rekening Kasda Pemkot di Bank Jateng melalui nomor rekening 668. Selain itu, pada pelaksanaan MoU tahun 2011, persoalan rekening Kasda juga tidak ada masalah.

Saat itu juga, pihaknya langsung melakukan pemindah buku dari giro ke deposito dan diketahui rekening itu tak diakui oleh pihak bank. Sementara sertifikat deposito sendiri, masih dipegang olehnya sebagai Bendahara Kas Umum Daerah (BKUD) Kota Semarang.

"Penyimpanan dilaksanakan 2007. Syarat penyimpanan uang di bank harus sesuai dengan keputusan Walikota yang ditindaklanjuti dengan tandatangan

MoU sementara rekening koran dan bunga terus berjalan. Sertifikat penyimpanan uang selama ini juga kami simpan di brankas khusus. Nah, saat penandatanganan itulah saya kaget, kami masih punya rekening dan sertifikat deposito tapi kok dana kami tidak diakui oleh BTPN," tukasnya.

Yudi menambahkan, laporan yang dilakukan pada awal Januari 2015 ke polisi ini dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK. Tindakan tersebut diikuti dengan pelaporan BTPN ke Polda Jateng pada pertengahan Januari untuk melaporkan kasus kehilangan dana tersebut.

"Jadi mereka bukan melaporkan saya, kami tidak saling lapor. Mereka lapor untuk menelusuri kehilangan dana tersebut, termasuk dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan salah satu oknum di pihak bank," imbuhnya.

Ditambahkan, ketika ada pemeriksaan BPK pihaknya pernah berkirim surat terkait persoalan ini ke BTPN sebanyak empat kali. Sebanyak tiga surat dibalas, namun satu surat yang menanyakan soal kejelasan besaran saldo dijawab, bahwa persoalan ini sudah dibawa ke ranah hukum sehingga akan diselesaikan pula secara hukum.

"Yang jadi pertanyaan, rekening koran ada, sertifikat ada, kenapa tak diakui. Dan saat MoU 2011 juga diakui. Inilah dasar dalam penelusuran dan pelaporan

kami. Saat ini bukti-bukti sudah dibawa ke pihak kepolisian," katanya.

Karena ada kebijakan pembatasan jumlah penyimpanan uang kas daerah di bank, selama ini kas daerah di simpan di 7 bank. Enam bank lainnya tak ada masalah. Hanya satu bank ini yang kemudian muncul persoalan.

"Jadi persoalannya bukan uang Kasda hilang Rp 22 miliar dan masih sisa Rp 80 juta. Tapi sertifikat penyimpanan deposito kami di bank tersebut tidak diakui. Soal indikasi persoalan inilah yang sedang ditangani pihak kepolisian," tegasnya.

Corporate Communications Head BTPN Eny Yulianti, mengatakan pihaknya akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polda Jateng. "Kami akan bekerja sama dan mendukung upaya penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas," ujarnya dalam rilisnya, kemarin.

Menurut Eny, sebagai bank nasional yang memiliki reputasi panjang di industri perbankan, BTPN selalu menjalankan standar prosedur operasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

"Hal itu kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi keuangan yang berjalan di BTPN memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh nasabah kami," tandasnya singkat. (sgt/muz)

dari hal 1